

**STUDI KOMPARATIF: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI  
INDONESIA DAN KUWAIT TERKAIT PEMBERIAN *HUMANITARIAN AID*  
TERHADAP POLEMIK PALESTINA – ISRAEL**

\*Nazwa Alia<sup>1</sup>, Kerenhapukh Valentina Zebua<sup>2</sup>, Sherly Desinta Simbolon<sup>3</sup>, Natasya Ulkhaira Adhian M<sup>4</sup>, Prity Oktor Haliawan<sup>5</sup>, Arvenia Noer<sup>6</sup>, Neneng Yani Yuningsih<sup>7</sup>

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

\*Email: nazwa21005@mail.unpad.ac.id

**ABSTRACT**

*The Palestinian conflict with Israel has been going on for centuries, beginning in the mid-1800s/ Tensions rose with Jewish migration to Palestine and the 1917 Balfour Declaration in favor of establishing a "national home for the Jewish people" in Palestine, exacerbating land and identity conflicts. Israel's annexation in 1980 also added to political tensions and territorial struggles. The conflict has become an international issue since the end of the World War, leading to a protracted humanitarian crisis that has drawn global attention, including from Indonesia and Kuwait. The governments of Indonesia and Kuwait oppose violence in Palestine and are committed to providing humanitarian assistance through foreign policy. This paper explains how the comparison of the implementation of the results of diplomacy and foreign policy related to humanitarian assistance to the Palestinian-Israeli polemic carried out by Indonesia and Kuwait is connected through Holsti's public policy theory, namely foreign policy as a cluster of orientations, foreign policy as a set of commitments to and a plan for actions, foreign policy as a form of behavior to see the extent to which the effectiveness of assistance from these countries to Palestine is researched through the literature study research method.*

**Keyword:** *Public Policy, Humanitarian Aid, Comparative Study, Palestine, Indonesia, Kuwait*

**PENDAHULUAN**

Kisruh Palestina dengan Israel merupakan konflik sudah berabad - abad lamanya. Awal mula konflik ini muncul antara Israel dan Palestina adalah sejak pertengahan tahun 1800-an, hal ini dikarenakan dimana kelompok minoritas Yahudi Eropa akan mendirikan Jewish Homeland (Tanah air bangsa Yahudi). Hal tersebut menjadi salah satu awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Permasalahan semakin meningkat di wilayah ini seiring dengan meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina. Selain itu, adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada Perang Dunia I, menyatakan dukungan untuk pembentukan “rumah nasional bagi orang Yahudi” (*national home for the Jewish people*) di Palestina. Deklarasi ini semakin memperburuk konflik tentang tanah dan identitas antar komunitas di wilayah Palestina. Tak hanya itu faktor konflik dari dua negara tersebut yaitu aneksasi oleh Israel yang terjadi pada tahun 1980, perselisihan ini tentu saja ada faktor politik dan perebutan wilayah di dalamnya (Wirajaya, 2020). Konflik antara Palestina dan Israel ini sudah menjadi isu Internasional, hal ini sudah berlangsung sejak berakhirnya perang dunia. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik terpanjang di dunia dan berdampak kepada krisis kemanusiaan yang terus berkepanjangan. Konflik ini menarik perhatian dunia, terutama dari negara-negara yang peduli terhadap krisis kemanusiaan, seperti Indonesia dan kuwait

Pemerintah Indonesia dan Kuwait menyayangkan kekerasan dan penderitaan yang terjadi di Palestina mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk merespon situasi internasional di Palestina melalui

bantuan kemanusiaan. Bantuan Kemanusiaan diberikan negara Indonesia bantuan kemanusiaan didasarkan memiliki "hutang moral" kepada Palestina sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaannya. Apalagi di dalam isi dari Pembukaan UUD 1945 tersebut mengamanatkan, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Pada artinya Indonesia berpendapat isu Palestina pada dasarnya bagian masalah dekolonisasi. Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina konsisten Indonesia akan dengan politik luar negeri yang anti kolonialisme. Bantuan kemanusiaan diberikan Indonesia kepada Palestina berbagai bentuk baik berupa uang, fasilitas kesehatan, makanan, dan kebutuhan lainnya kepada para pengungsi. Sedangkan Kuwait sebagai negara berasal dari negara Timur memberikan sejumlah uang melalui Sesuai databoks "Pemberian Bantuan untuk Warga Palestina 2023" sekitar 31,42 miliar melalui UNRWA.

Menurut Holsti (1992) ada beberapa konsep kebijakan luar negeri yang menjelaskan berbagai hubungan suatu negara atas kejadian dan situasi yang ada di luar negaranya sendiri, diantaranya yaitu

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientations*)

Konsep ini menjelaskan bahwa orientasi sebagai pedoman untuk pemerintah dalam menghadapi kondisi eksternal yang diharuskannya pemerintah sehingga negara bertindak berdasarkan orientasi yang ditetapkan tersebut. Orientasi sendiri adalah sebuah persepsi, sikap, dan nilai dari sebuah negara berdasarkan keadaan strategis atau sejarah yang menjadi acuan posisi negara tersebut dalam politik internasionalnya.

2. Kebijakan luar negeri sebagai perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as set of commitments to and a plan for actions*)

Konsep ini menjelaskan bahwa guna mengatur interaksi dan hubungan dengan negara lain suatu negara harus menetapkan beberapa prinsip, tujuan dan langkah-langkah yang melibatkan komitmen negara tersebut dalam mencapai tujuan nasionalnya dan strateginya untuk mencapai konteks tersebut dalam hubungan internasional. Rencana serta komitmen tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh pemerintah (pembuat keputusan) untuk mempertahankan lingkungan eksternal dan membuat rencana yang masih berhubungan dengan kebijakan luar negeri dari negara tersebut sebagai komitmen dan rencana negara tersebut untuk membantu negara mengkoordinasikan interaksi dengan negara lain untuk tujuan nasional dan lingkungan internasional yang senantiasa berubah.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*)

Konsep ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri sudah dilakukan secara nyata dengan beberapa tindakan, keputusan dan interaksi yang dilakukan para pemerintah (pembuat keputusan) untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan internasional yang biasanya berhubungan dengan kejadian yang ada di lingkungan luar negaranya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Holsti (1992) dasar hubungan suatu negara ke negara lainnya didasarkan pada orientasi, tindakan dan perilaku atau aksinya, terdapat beberapa negara yang telah melaksanakan kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi perangkat komitmen dan bentuk perilaku dimana negara tersebut adalah Indonesia dan Kuwait yang memiliki hubungan politik dengan Palestina dan senantiasa memberikan bantuan kepada Palestina.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian terdiri dari serangkaian prosedur sistematis yang dirancang untuk memastikan kebenaran dalam karya ilmiah, seperti penulisan jurnal, yang pada akhirnya menghasilkan jurnal berkualitas tinggi yang memenuhi standar penelitian (Soemitro, 1990). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian untuk menggambarkan manfaat implementasi sistem (Sugiyono, 2013). Metode penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan studi literatur, dengan mengandalkan berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data penelitian. Jenis penelitian ini dikenal dengan istilah *library research* atau studi pustaka, dimana fokusnya adalah pada literatur-literatur yang ada. Dalam penelitian ini, karya-karya yang sejenis atau berkaitan digunakan untuk tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN

### Kondisi Palestina

Konflik yang terjadi di Palestina telah berlangsung selama hampir 73 tahun. Konflik antara Israel dan Palestina terjadi karena adanya perbedaan nasionalisme, dimana Palestina mewakili gagasan nasionalisme Arab, sedangkan Israel mewakili gagasan Zionisme. Perbedaan dalam pandangan nasionalisme ini menjadi penyebab awal dari konflik tersebut. Palestina merupakan bagian dari *Daulah Islamiyah* dibawah kekuasaan Turki. Namun, setelah wilayah ini dikuasai oleh Inggris pada tahun 1917, sebagian besar wilayah Palestina sekitar 48% direbut oleh penduduk Yahudi-Israel. Akibatnya, penduduk Palestina yang mayoritas beragama Muslim menjadi tidak merdeka. Israel terus berupaya menguasai Palestina karena keyakinan kaum Zionis bahwa bangsa Yahudi hanya akan aman jika bersatu dan berada di wilayah yang dijanjikan di Yerusalem. Saat ini wilayah tersebut diduduki Palestina, namun terus didesak oleh Israel agar dapat ditempati oleh penduduk Yahudi.

Pada tahun 1947, PBB membagi wilayah kedua negara ini dengan tujuan untuk menghindari demonstrasi lebih lanjut. Puncak dari adanya konflik ini yaitu pada tahun 1968 ketika Israel dengan penduduk Yahudi menyatakan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1967 konflik kembali memanas dengan terjadinya Perang Enam Hari, dimana Israel berhasil menduduki beberapa wilayah di Palestina. Akibat konflik tersebut, beberapa upaya dilakukan untuk mencapai perdamaian, seperti Konferensi Jenewa dan Perjanjian Oslo. Namun, upaya-upaya ini gagal meredakan konflik kedua negara tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pembunuhan mantan Perdana Menteri Israel pada tahun 1995. Selain itu, Amerika Serikat juga turut serta untuk berperan dalam melakukan perdamaian antara kedua negara tersebut yaitu dengan cara melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang dikenal dengan sebutan *Peace Talk*. Namun, upaya ini juga gagal dilakukan dalam melakukan perdamaian dan menyebabkan peningkatan ekspansi wilayah yang semakin intensif di tepi Barat Palestina.

Selain itu, bangsa Yahudi melakukan berbagai cara untuk menduduki tanah Palestina. Salah satunya yaitu melalui perjanjian Balfour di Inggris. Perjanjian ini merupakan upaya untuk mengakuisisi tanah di Palestina dan tindakan-tindakan lainnya sebagai provokasi. Di samping itu, masyarakat Muslim dari berbagai kalangan selalu memegang teguh prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan di Palestina. Oleh karena itu, mereka mengajukan usulan untuk mencabut Deklarasi Balfour yang dianggap tidak adil dan merugikan hak-hak bangsa Palestina, menghentikan kedatangan Yahudi, mencegah penjualan tanah kepada orang Yahudi, mendirikan pemerintahan Palestina yang dipilih oleh parlemen sebagai wujud keinginan rakyat, serta berpartisipasi dalam perundingan dengan Inggris untuk mencapai kesepakatan yang menjamin kemerdekaan Palestina.

Keberhasilan orang-orang Yahudi meraih kemerdekaan dan kegagalan umat Islam di Palestina menyebabkan berdirinya Israel selama periode Islam di Palestina dan sekitarnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh kemampuan orang-orang Yahudi untuk mengorganisir kekuatan dan memenangkan dukungan, tetapi juga karena lemahnya perlawanan umat Islam di Palestina selama pemerintahan Turki Utsmani. Agresi dari negara-negara Eropa tidak dapat dihentikan oleh pasukan Turki Utsmaniyah. Selain itu, faktor lainnya yaitu kurangnya upaya umat Islam dalam mempertahankan persatuan (Pan-Islamisme) diantara umat Islam secara keseluruhan.

### **Implementasi Perbandingan Negara Menurut Teori Kebijakan Luar Negeri Sebagai Sekumpulan Orientasi (*as a cluster of orientations*) Indonesia terhadap Palestina**

Orientasi Indonesia dalam kebijakan perbantuan luar negeri terutama kepada Palestina berangkat dari tindakan-tindakan dan relasi hubungan internasional Indonesia, baik bilateral maupun multilateral yang difokuskan pada kepentingan nasional dan mengikuti prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik bebas aktif merupakan hasil dari pemikiran cerdas para mantan diplomat Indonesia yang telah melihat berbagai situasi sulit selama bekerja sama dengan negara-negara besar. Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada gagasan "bebas aktif", dengan tujuan untuk memajukan kepentingan nasional. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dibatasi oleh idiom atau politik negara asing, atau blok negara tertentu. Aktif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara aktif berkontribusi pada perdamaian dunia dan kemajuan kebebasan, kesetaraan, dan kolaborasi internasional, mempromosikan ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan kolaborasi internasional dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain.

Gagasan bebas aktif ini merupakan inti dari upaya Indonesia untuk memantapkan perannya di dunia internasional. Palestina telah muncul sebagai titik fokus dalam upaya Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Palestina adalah salah satu negara yang menjadi fokus upaya Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Indonesia selalu menjaga hubungan diplomatik dengan Palestina. Menurut sejarah, Palestina merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mendukung dan mengakui Indonesia setelah proklamasi. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi negara Palestina (Noviar, 2015). Dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dari dorongan terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang melahirkan KTT luar biasa OKI tahun 2016 yang memastikan 23 poin dalam deklarasi Jakarta bisa terimplementasikan. Selain itu, Indonesia juga mendorong para pemimpin OKI untuk memobilisasi terhadap dukungan Palestina dalam forum internasional serta Indonesia mendorong adanya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah dalam forum OKI (Sukamta, 2017).

Sejauh ini, kebijakan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina konsisten untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan Resolusi DK PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyatakan pengembalian tanpa syarat seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara.

### **Kuwait terhadap Palestina**

Kuwait berperan sebagai politik "*high-profile*" ke dalam kebijakan luar negerinya. Keterlibatan politik luar negeri Kuwait ditunjukkan dengan peran aktifnya sebagai mediator dalam berbagai perselisihan dan krisis di Timur Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjadi negara

penyeimbang di kawasan Timur Tengah. Landasan kebijakan luar negeri terkait perbantuan kepada negara Palestina yakni dimana Kuwait berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di zona perang dan menangani masalah global seperti konflik Palestina-Israel. Kuwait, sebagai anggota GCC, Liga Arab, dan OKI, mempertahankan hubungan dekat dengan negara-negara Islam yang berkonflik, terutama dalam hal mengupayakan perdamaian dan keamanan global. Berdasarkan pedoman pada lima prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang kebijakan luar negeri landasan dasar perbantuan Kuwait terhadap Palestina yakni menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas jumlah penduduk asing di negaranya, terutama dalam hal kestabilan jumlah populasi warga Palestina. Dukungan Kuwait untuk Palestina juga didasarkan pada perjanjian dan piagam Liga Arab, yang mencakup prinsip-prinsip untuk menjaga hubungan baik di antara negara-negara Arab serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Arab.

### **Implementasi Perbandingan Negara Menurut Kebijakan Luar Negeri Sebagai Perangkat Komitmen dan Rencana untuk Bertindak (*as set of commitments to and a plan for actions*)**

#### **Indonesia terhadap Palestina**

Indonesia merupakan negara yang secara konsisten berkomitmen dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dinyatakan dengan tercantumnya misi “berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian” dunia pada alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945. Amanat UUD ini, menjadi pegangan utama sekaligus dasar Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri. Komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia juga tercermin dari perkataan Retno L. P. Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Dalam lima tahun kedepan, ruh ini akan tetap dijaga. Kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang berhasil memperjuangkan kepentingan nasional dan kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang terus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia” (Kementerian Luar Negeri RI).

Dalam urusan misi perdamaian dunia, Indonesia menunjukkan langkah konkrit untuk membantu perdamaian di dunia dengan membuat kebijakan “Diplomasi Tangan di Atas”. Diplomasi ini membuat Pemerintah RI meluncurkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian AID). Lembaga ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam hal dana bantuan hibah bagi negara yang membutuhkan. Salah satu negara yang mendapatkan kebijakan diplomasi tangan di atas adalah Palestina. Indonesia menggunakan dana hibah dari LDKPI dan dana kolektif dari masyarakat agar dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan pada Palestina. Pada organisasi multilateral, Indonesia secara konsisten berkomitmen membantu Palestina mencapai kemerdekaannya melalui organisasi internasional seperti dalam OKI. Dalam kancah organisasi Internasional seperti PBB, Indonesia secara konsisten memberikan dukungan kepada Palestina melalui Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga menerapkan rencana diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai kontribusi konkrit penyelesaian masalah. Dalam hal ini, Indonesia memiliki semboyan “*Indonesia always wants to be part of solution*” yang artinya Indonesia selalu ingin menjadi bagian dari solusi. Salah satu rencana diplomasi Indonesia adalah membantu perdamaian Palestina-Israel. Hal ini tertuang dalam rencana diplomasi perdamaian dan kemanusiaan di dokumen Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2019-2024:

1. Isu Rakhine State;

2. Perdamaian di Afghanistan;
3. Perdamaian di Palestina;
4. Kerjasama dalam rangka pencapaian SDGs, termasuk dengan
5. Negara-negara Pasifik.
6. Penyelesaian perundingan *Code of Conduct* (COC) di Laut Cina Selatan.
7. Penguatan Promosi dan Perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR.
8. Interfaith, Intermedia, *Youth and Culture dialogue*  
(Kementerian Luar Negeri RI, 2020)

### **Kuwait terhadap Palestina**

Kuwait merupakan negara mempunyai kebijakan luar negeri yang berlandaskan aktif sebagai mediator dalam permasalahan krisis di Timur Tengah. Hal ini menandakan bahwa rencana Kuwait dalam menjaga perdamaian dunia adalah menjadi mediator atau penengah bagi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya adalah penanganan konflik Israel dan Palestina. Dalam kasus penyelesaian konflik Indonesia dan Palestina, Kuwait memiliki beberapa strategi dalam penanganannya, seperti:

1. Menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia atas dasar persamaan prinsip luar negeri, yaitu netral dan mencapai keamanan dan perdamaian. Kuwait dan Indonesia bersinergi mendorong negara lain untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakui pembentukan Palestina yang merdeka
2. Membawa permasalahan ke dalam kancah organisasi internasional seperti PBB dan OKI. Kuwait menjalankan rencana untuk membawakan isu-isu penting terkait Palestina, kemanusiaan, dan terorisme.
3. Menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dalam diplomasi bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Pada intinya, Kuwait menawarkan diri sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Sebagai mediator, Kuwait memilih untuk tetap bersikap netral terhadap konflik yang sedang berlangsung. Sikap netral ini memungkinkan Kuwait untuk menjalankan mediasi tanpa adanya kendala. Dalam hal bantuan kemanusiaan, Kuwait memiliki kebijakan *dinar diplomacy* atau diplomasi dollar yang merupakan bantuan keuangan kepada negara yang membutuhkan, salah satu negara yang mendapatkan kebijakan ini adalah negara Palestina.

### **Implementasi Perbandingan negara menurut Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi ( *as a form of behaviour* )**

#### **Indonesia terhadap Palestina**

Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah terlibat dalam konflik Palestina-Israel. Hak-hak rakyat Palestina terus dikampanyekan dan didukung penuh oleh Indonesia saat mereka memperoleh kemerdekaan. Pemerintah Indonesia terus mengamati perkembangan konflik Palestina-Israel hingga saat ini. Negara ini tidak hanya terus mengamati apa yang terjadi di Palestina, tetapi juga menawarkan bantuan kepada orang-orang di sana. Selain itu, Indonesia sering mengangkat masalah konflik Palestina-Israel di forum internasional. Pemerintah tidak hanya berdiri sendiri dalam membantu rakyat Palestina, tetapi juga banyak lembaga sosial kemanusiaan yang berpartisipasi untuk mempermudah setiap pengeluaran bantuan ke Palestina. Menilai fungsi lembaga sosial kemanusiaan yang luar biasa dalam masalah Palestina jelas meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, sehingga pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan Indonesia bekerja sama.

Indonesia selalu menjadikan Palestina sebagai prioritas utama dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini sesuai dengan janji konstitusi negara Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, untuk menghapus penjajahan global karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, fokus utama upaya Indonesia adalah untuk memastikan bahwa Dewan Keamanan PBB terus memperhatikan pentingnya penyelesaian masalah Palestina (yang masih dipegang) dan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dan meningkatkan kapasitas serta bantuan kemanusiaan Palestina, baik secara bilateral maupun melalui kerangka tripartite (Mardani, 2019). Berikut adalah beberapa hal yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap Palestina yaitu:

1. Indonesia mengerahkan upaya bantuan yang maksimal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina; Melalui menteri luar negeri, Retno Marsudi menyampaikan pernyataan presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mengambil sikap tegas terhadap tindakan Israel yang mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur dan penyerangan terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsha. Selain itu, pemerintah Indonesia terus memantau segala hal yang terjadi di Palestina dan mencegah eskalasi konflik dan kekerasan, terutama yang terjadi di Jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan kematian warga sipil. Dalam hal ini, Indonesia berusaha sekuat tenaga dan melakukan upaya di segenap lini, termasuk di *Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People* (CEIRPP). Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB tahun 1975 dan menjadi wakil ketua komite. Retno menekankan bahwa Israel telah mengganggu hak-hak rakyat dan bangsa Palestina selama bertahun-tahun. Karena itu, Indonesia akan terus mendukung rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
2. Pada 04 November 2024, presiden Jokowi resmi melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma. Jokowi menyampaikan dalam pidatonya mengatakan “Alhamdulillah pada pagi hari ini bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju bandara El Arish di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza”. Presiden menyampaikan bahwa pengiriman tahap pertama bantuan akan dikirim melalui tiga pesawat, yang akan membawa 51,5 ton bantuan, yang terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini di Gaza. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Aliansi Kemanusiaan Indonesia (IHA), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Kitabisa memberikan bantuan, serta pemerintah, militer, dan kepolisian. Presiden menyatakan harapannya untuk mendapatkan dukungan tambahan dari masyarakat dan dunia usaha. Bantuan tersebut telah sampai di bandara EL Arish Mesir pada 06 November 2023 dan telah masuk di Gaza, Palestina pada tanggal 09 November 2023. Hal tersebut dipastikan oleh Tim Bulan Sabit Merah Mesir (*Egyptian Red Crescent; ERC*) dan diteruskan oleh Dubes RI untuk Mesir, Lutfi Rauf. Sebagaimana dilaporkan oleh KBRI Kairo, setelah melalui prosedur *ground handling* dan transit di gudang pada 6 November 2023, bantuan diangkut dengan truk-truk lori ke pool antrian pertama barang bantuan di Al Arish, Sinai Utara, Mesir. Pada 8 November 2023, bantuan diangkut langsung ke Nitzana, wilayah perbatasan Mesir-Israel yang berjarak 42 km dari Rafah. Tim ERC di lapangan memberitahu KBRI Kairo pada tanggal 9 November 2023 bahwa truk bantuan tahap pertama dari Indonesia telah berhasil masuk ke Gaza. Kemudian pada tanggal 10 November 2023, berita tersebut dikonfirmasi oleh liputan Al Jazeera yang mengutip pernyataan militer Israel yang menyatakan bahwa sekitar 700 truk bantuan kemanusiaan telah

- memasuki Gaza. Salah satu liputan tersebut menampilkan gambar truk pembawa bantuan dari Indonesia.
3. Pada 20 November 2023, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat Palestina yang dilepaskan di Bandara Halim Perdanakusuma. Setelah sebelumnya pengiriman tahap pertama sukses dilakukan awal bulan November 2023 lalu. Total bantuan yang dikirimkan pada tahap kedua ini sebanyak 21.7 ton, dengan 3.3 ton dari pemerintah Indonesia untuk obat-obatan dan perlengkapan kesehatan dan 18,4 ton dari masyarakat Indonesia untuk makanan kaleng, matras, selimut, perlengkapan kebersihan dewasa dan anak, makanan siap saji, dan perlengkapan lainnya. Sebagaimana diumumkan oleh Pahala Mansury, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mekanisme pendistribusian bantuan akan mengikuti alur yang sama seperti bantuan tahap pertama serta bekerjasama dengan UNRWA dan ERC. Bantuan tahap kedua diberikan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Bantuan pemerintah berasal dari Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan bantuan dalam kerangka Pemberian Hibah kepada Masyarakat Palestina oleh UNRWA. Sedangkan untuk bantuan masyarakat Indonesia berasal dari donasi barang yang diberikan atau dikumpulkan oleh masyarakat atau lembaga non-pemerintah, serta perusahaan Indonesia seperti Aliansi Kemanusiaan Indonesia, Kita Bisa, Baznas, PT Paragon, dan lainnya.
  4. Di Mahkamah Internasional pada 23 Februari 2024, Indonesia menyatakan pernyataan lisan dalam mendukung Palestina. Tepatnya di Den Haag, Belanda. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuat pernyataan lisan untuk mendukung fatwa hukum Mahkamah Internasional tentang konsekuensi hukum pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel atas Palestina. Pernyataan lisan di Indonesia memiliki dua komponen utama. Menlu menegaskan dari segi yurisdiksi (*advisory opinion*) bahwa Mahkamah Internasional memiliki otoritas untuk mengeluarkan keputusan hukum. Kemudian, dari segi substansi (*self determination*), Menlu menegaskan bahwa kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional dan menjelaskan konsekuensi hukumnya.

Itulah beberapa contoh perilaku pembantuan yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap Palestina dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan antara palestina dengan Israel. Kedepannya, Indonesia berkomitmen dan untuk terus konsisten dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan bangsa Palestina, sesuai dengan pernyataan menteri luar negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa "Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka," disampaikan di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), Bandung, 2024, dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM).

### **Kuwait terhadap Palestina**

Pemerintah Kuwait menyatakan bahwa mereka akan terus mempertahankan solidaritasnya dengan rakyat Palestina dan akan menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai fokus hubungan internasional. Seluruh warga Kuwait mendukung perjuangan Palestina, kata kuasa usaha Kedutaan Besar Kuwait untuk Indonesia, Abdullah Yateem Al-Fadhli.

"Baik pemerintah, pemimpin, maupun rakyat Kuwait tidak mengakui adanya institusi (negara) zionis, dan tidak mengakui perampasan apapun terhadap tanah Palestina" pernyataannya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kuwait, Jakarta, pada 15 Februari 2023.

Al-Fadhli mengatakan bahwa masalah Palestina yang merupakan bagian dari bangsa Arab adalah masalah hak dan keadilan. Dia mengatakan bahwa bangsa Palestina adalah pemilik asli tanah airnya dan berhak atas tanah tersebut meskipun Israel terus merongrongnya. Ia mengatakan bahwa masalah Israel dan Palestina sangat penting karena keberadaan Masjid Al Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan bagian dari sejarah agama, berada di sana.

Pemerintah Kuwait mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan sebesar US\$ 2 juta kepada UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina. Di Kedutaan Besar Kuwait di Amman, HE Hamad Rashid Al-Marri, Duta Besar Kuwait untuk Kerajaan Hashemite Yordania, menyerahkan cek kontribusi kepada Tamara Alrifai, Direktur Hubungan Eksternal dan Komunikasi. Duta Besar Al-Marri menekankan bahwa bantuan ini akan membantu program pembangunan manusia dan kemanusiaan UNRWA di wilayah tersebut menjadi lebih baik.

Lembaga amal Kuwaiti; Namaa, Namaa menyatakan bahwa mereka terus memberikan bantuan kepada masyarakat di Jalur Gaza, Palestina, yang terkena dampak kerusakan oleh pendudukan Israel sejak 7 Oktober 2023. Asosiasi Namaa dikutip Quds Press menyatakan "Distribusi lebih dari 2000 makanan kepada keluarga di sekolah-sekolah penampungan di jalur Gaza, dan distribusi pakaian kepada 400 penerima manfaat yaitu anak-anak dan yatim piatu". Kepala sektor teknologi komunikasi dan informasi di Yayasan Namaa, Kuwait, Abdulaziz Al-Kandari mengatakan "Langkah ini bertujuan meringankan penderitaan mereka yang terkena dampak di Jalur Gaza, dan memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan mereka mengingat kekurangan pangan yang berjumlah besar, tempat tinggal, dan layanan kesehatan"

Untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak di bidang ketahanan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan, "Namaa" Kuwait telah meluncurkan kampanye bantuan "Fazaa Palestine". Pada 21 Juli 2022, sebuah badan amal Kuwait menandatangani perjanjian dengan Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) untuk membantu merehabilitasi rumah-rumah yang hancur oleh tindakan agresi Israel di Jalur Gaza. Menurut Bader Al-Sumait, Direktur Jenderal Organisasi Amal Islam Internasional (IICO) Kuwait, "Proyek rehabilitasi 50 unit rumah di Gaza merupakan respon atas penderitaan penduduk Gaza akibat blokade yang tidak adil selama 15 tahun." Di sela-sela penandatanganan perjanjian, Al-Sumait menyatakan betapa pentingnya melindungi keluarga Palestina yang tinggal di tempat terbuka dan di reruntuhan rumah mereka yang rusak karena pelanggaran kemanusiaan yang terus dilakukan Israel. Menurut Amira Al-Hassan, Direktur UN-Habitat untuk wilayah Teluk Arab di Kuwait, "Bantuan rekonstruksi Kuwait terus meluas ke seluruh dunia." Ia menunjukkan bahwa proyek rehabilitasi membantu menciptakan peluang kerja baru dan mengembalikan pengungsi ke rumah mereka. Perwakilan regional negara Arab untuk program UN-Habitat, Irfan Ali, menyatakan bahwa rehabilitasi rumah adalah salah satu inisiatif utama di Jalur Gaza, terutama setelah perang Mei 2021 yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan merusak banyak fasilitas pemerintah dan penduduk sipil.

## KESIMPULAN

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan konflik berkepanjangan dan yang sudah terlalu banyak memakan korban jiwa. Inti dari konflik antara Palestina dan Israel adalah tentang perebutan wilayah, dimana Israel melakukan agresi militer besar-besaran demi bisa menduduki wilayah Palestina. Konflik antara keduanya dimulai pada saat kelompok minoritas Yahudi Eropa akan mendirikan Jewish Homeland (Tanah air bangsa Yahudi). Hal ini diperparah dengan adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang menyatakan dukungan untuk pembentukan "rumah nasional bagi orang Yahudi" (*National*

*Home for The Jewish People*) di Palestina. Dalam hal ini, Israel sudah sangat jelas sedang melakukan penjajahan di atas tanah milik Palestina. Korban jiwa yang berjatuh dari konflik ini juga sangat besar sehingga sudah sewajarnya isu peperangan antara Israel-Palestina menjadi perhatian dunia internasional. Berbagai negara berusaha membangun hubungan diplomatik dengan Palestina agar dapat mengirimkan humanitarian aid. Salah satu negara yang memiliki perhatian besar terhadap konflik Palestina-Israel adalah Indonesia dan Kuwait. Keseriusan kedua negara ini dapat terlihat dari kebijakan luar negerinya.

Berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Holsti (1992) kebijakan luar negeri sebuah negara terhadap negara lain tentang sebuah situasi atau kejadian dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientations*), Kebijakan luar negeri sebagai perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as set of commitments to and a plan for actions*), dan Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Baik Indonesia dan Kuwait sudah memiliki seperangkat kebijakan bantuan humanitarian aid kepada Palestina. Dilihat dari kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientations*) Indonesia terhadap Palestina terlihat dari orientasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah "bebas aktif". Bebas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dibatasi oleh idiom atau politik negara asing, atau blok negara tertentu. Aktif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara aktif berkontribusi pada perdamaian dunia dan kemajuan kebebasan, kesetaraan, dan kolaborasi internasional, mempromosikan ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan kolaborasi internasional dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain. Sedangkan orientasi kebijakan Kuwait kepada Palestina tercermin dari kebijakan luar negeri Kuwait yang berorientasi pada "high-profile" dimana Kuwait mengambil peran aktif sebagai mediator dalam berbagai perselisihan dan krisis di Timur Tengah, termasuk konflik Palestina dan Israel.

Dari sisi Kebijakan luar negeri sebagai perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as set of commitments to and a plan for actions*), dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam memberikan bantuan humanitarian aid kepada Palestina. Komitmen Indonesia terhadap Palestina tercermin dari berbagai komitmen dan rencana seperti "Diplomasi Tangan di Atas". Diplomasi ini membuat Pemerintah RI meluncurkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID). Lembaga ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam hal dana bantuan hibah bagi negara yang membutuhkan. Salah satu negara yang mendapatkan kebijakan diplomasi tangan di atas adalah Palestina. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk selalu bagian dari solusi untuk misi perdamaian dunia, hal ini terlihat dari semboyan "*Indonesia always wants to be part of solution*". Komitmen bantuan Indonesia terhadap Palestina juga terlihat dari rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2019-2024 yang mengangkat isu perdamaian di Palestina sebagai salah satu perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sedangkan komitmen Kuwait terhadap bantuan humanitarian aid kepada Palestina tercermin dari kebijakan luar negeri yang berlandaskan aktif sebagai mediator dalam permasalahan krisis di Timur Tengah. Hal ini menandakan bahwa rencana Kuwait dalam menjaga perdamaian dunia adalah menjadi mediator atau penengah bagi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya adalah penanganan konflik Israel dan Palestina.

Dari segi kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) Indonesia terhadap Palestina terlihat dari bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dikirimkan pada 04 November 2024. Selain melalui bantuan, aksi nyata dukungan Indonesia juga terlihat dari diplomasi Indonesia seperti Di Mahkamah Internasional pada 23 Februari 2024, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan pernyataan lisan dalam mendukung Palestina. Aksi bantuan Kuwait terhadap Palestina juga tercermin dari bantuan sebesar US\$ 2 juta kepada

UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina. Selain itu, Lembaga amal Kuwait; Namaa memberikan bantuan yang terdistribusi 2000 makanan kepada keluarga di sekolah-sekolah penampungan di jalur Gaza, dan distribusi pakaian kepada 400 penerima manfaat yaitu anak-anak dan yatim piatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- M, F. G. (2019). *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait & Uni Emirat Arab* (1st ed., Vol. xiv). LIPI Press.
- Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.
- Hassan, M. Z. (1980). *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Bulan Bintang.
- Masyrofah. (2023). *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*. Deepublish.
- Setiawan, A. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*.
- Anrian, A. (2023). Relasi Indonesia- Palestina Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 9(1).  
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/10825/pdf>
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN*, 2745, 5920.
- Islamiah, F. (n.d.). Tantangan Geopolitik di Kuwait: Analisis Terhadap Dinamika Regional dan Peran Kuwait dalam Konteks Global.
- Juntami, A. P. (2023). Pancasila and Peace: Indonesia's Role in Mediation of The Israel-Palestine Conflict; Implementation of Pancasila in World Peace Diplomacy. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.9(No.3), 26-40.
- Muchsin, M. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT*, xxxix(2), 390-406.
- Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 73-100.
- Nugraha, T. A. (2023, Jul-Des). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 8(No. 2), 83-109.
- Prabhandhari, N. P. D., & Aryani, M. I. (2021, February 28). Act East Policy: Analisis Faktor Internal dan Eksternal India dalam Mengeluarkan Act East Policy terhadap Korea Selatan (2014-2019). *Vol. 2*, 142-164.
- Pramita, N. T., & Zahidi, M. S. (2023). Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Era Jokowi. *Review of International Relations*, 5(1), 84-106.
- Rasyid, M. (2022, Desember 2). NASIB DIASPORA PALESTINA DI KUWAIT: ANTARA RUMAH KEDUA DAN DAMPAK PERANG TELUK. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.5(No.2), 190-198.
- Rindu, S. K. (2020). *Kebijakan Kuwait dalam Konflik Yaman (2016-2020)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rasyid, M. (2022, Desember 2). NASIB DIASPORA PALESTINA DI KUWAIT: ANTARA RUMAH KEDUA DAN DAMPAK PERANG TELUK. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.5(No.2), 190-198.
- Satris, R. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2(No.2), 161-170.

- Suratiningsih, D., Pupita, D., & Safira, S. (2020). Diplomasi Perdamaian Dan Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(1), 11-28.
- Susetyorini, P. (2014). Politik Luar Negeri Indonesia. *Gema Keadilan*, 1(1), 109-116.
- Wati, E. S., & Burdah, I. (2024). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. *PIR Journal*, 9(1), 19-32.
- Ahdiat, A. (2023). 12 Negara Beri Bantuan untuk Palestina, Totalnya Rp4,5 Triliun. Databoks. Retrieved April 27, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/23/12-negara-beri-bantuan-untuk-palestina-totalnya-rp45-triliun>
- Aliyah. H. (2023). Lembaga Amal Kuwait: Kami Terus Memberikan Bantuan Kepada Rakyat di Gaza. Retrieved December 14, 2023, from <https://minanews.net/lembaga-amal-kuwait-kami-terus-memberikan-bantuan-kepada-rakyat-di-gaza/>
- britannica. (n.d.). Kuwait - Persian Gulf War, Aftermath, Oil. Britannica. Retrieved April 30, 2024, from <https://www.britannica.com/place/Kuwait/The-Persian-Gulf-War-and-its-aftermath>
- CNN Indonesia. (2023, November 24). Sri Mulyani Jelaskan Sumber Bantuan Rp31,9 M untuk Palestina. CNN Indonesia. Retrieved April 2, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231124164746-532-1028615/sri-mulyani-jelaskan-sumber-bantuan-rp319-m-untuk-palestina>
- Cafiero, G. (n.d.). Kuwait refuses to budge as other Gulf nations abandon the Palestinian cause. <https://www.trtworld.com/opinion/kuwait-refuses-to-budge-as-other-gulf-nations-abandon-the-palestinian-cause-24375>
- Demi Kemanusiaan, TNI Segera Siapkan Bantuan Untuk Palestina | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA. (2023). Puspen TNI. Retrieved April 27, 2024, from <https://tni.mil.id/view-232961-demi-kemanusiaan-tni-segera-siapkan-bantuan-untuk-palestina.html>
- Fallahnda, B. (2024). Bagaimana Kondisi Palestina Terkini, Benarkah Sudah Aman? Tirto.id. Retrieved April 27, 2024, from <https://tirto.id/bagaimana-kondisi-palestina-terkini-benarkah-sudah-aman-gWPE>
- Ihsan. N. (2023). Kuwait Tegaskan Dukungan Bulat Terhadap Perjuangan Palestina. Retrieved February 15, 2023, from <https://www.antarane.ws.com/berita/3397494/kuwait-tegaskan-dukungan-bulat-terhadap-perjuangan-palestina>
- Jamaluddin, W. (2023, October 23). Persaudaraan Erat Indonesia dan Palestina – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan. Retrieved April 17, 2024, from <https://www.radenintan.ac.id/persaudaraan-erat-indonesia-dan-palestina/>
- Jo, B. (2024). Update Perang Israel di Gaza Terkini, Jumlah Korban & Situasinya. Tirto.id. Retrieved April 27, 2024, from <https://tirto.id/update-perang-israel-di-gaza-terkini-jumlah-korban-situasinya-gV4w>
- Kominfo (2021). Indonesia Kerahkan Upaya Maksimal Bantu Perjuangan Hak-Hak Rakyat Palestina. Retrieved May 12, 2021, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34458/indonesia-kerahkan-upaya-maksimal-bantu-perjuangan-hak-hak-rakyat-palestina/0/berita>
- Kemlu (2024). Indonesia Konsisten Perjuangan Hak-Hak dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Retrieved January 08, 2024, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5661/view/indonesia-konsisten-perjuangan-hak-dan-kemerdekaan-bangsa-palestina>

- Kemlu (2024). *Indonesia Sampaikan Pernyataan Lisan Dukung Palestina di Mahkamah Internasional*. Retrieved February 23, 2024, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5771/view/indonesia-sampaikan-pernyataan-lisan-dukung-palestina-di-mahkamah-internasional>
- Kemlu (2024). *Pemerintah Indonesia Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan Tahap Kedua Untuk Palestina*. Retrieved November 20, 2024, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5527/view/pemerintah-indonesia-fasilitasi-bantuan-kemanusiaan-tahap-kedua-untuk-palestina>
- Kemlu (2024). *Bantuan Tahap Pertama Indonesia Telah Tiba di Gaza*. Retrieved November 13, 2023, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5492/view/bantuan-tahap-pertama-indonesia-telah-berhasil-tiba-di-gaza>
- Kemlu (2024). *Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina*. Retrieved November 04, 2023, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5457/view/presiden-jokowi-lepas-bantuan-kemanusiaan-untuk-palestina>
- Kementerian Luar Negeri KBRI Kuwait. (n.d.). Rencana Strategis (Renstra) KBRI Kuwait City 2020-2024. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9SZW5jYW5hJTlwU3RyYXRlZ2l2JTlwS0JSSSUyMEt1d2FpdCUyMENpdHklMjAyMDIwLTlwMjQucGRm>
- Kementerian Luar Negeri RI. (n.d.). Menteri Luar Negeri Ri Retno L. P. Marsudi Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024. Kemlu. Retrieved April 3, 2024, from <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvTWVkaWEIMjBCcmllZmluZyUyME1lbmx1JTlwUkklMjAtJTlwUHJpb3JpdGFzJTlwUG9sdWdyasUyMDIwMTklMjAtJTlwMjQucGRm>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020, Desember 7). Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMEtlbWVubHUIMjAyMDIwLTlwMjQucGRm>
- Kementerian Perdagangan. (2019, Februari 28). *Pernyataan Bersama Indonesia-Palestina*. Kementerian Perdagangan. Retrieved April 1, 2024, from <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pernyataan-bersama-indonesia-palestina>
- Kusuma (2022). *Yayasan Kuwait Sepakat Untuk Rehab 50 Rumah di Jalur Gaza*. Retrieved July 23, 2022, from <https://blog.npc.id/yayasan-kuwait-sepakat-untuk-rehab-50-rumah-di-jalur-gaza/>
- Lloyds Bank, (2024). *Kuwait: Tinjauan Ekonomi dan Politik*. Retrieved April 1, 2024, from <https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/kuwait/economical-context>
- Mutia. C. A. (2024). *Penerimaan Pajak Capai Rp. 342,88 Triliun per Maret 2024*. Databoks Retrieved March 27, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/27/penerimaan-pajak-capai-rp34288-triliun-per-15-maret-2024>
- Mutia. C. A. (2024). *Pendapatan Negara Tembus Rp. 2.700 Triliun pada 2023, Mayoritas dari Pajak*. Databoks Retrieved January 03, 2024, from [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/pendapatan-negara-tembus-rp2700-triliun-pada-2023-mayoritas-dari-pajak#:~:text=Pendapatan%20negara%20berasal%20dari%20tiga,%2C9%25%20\(yoy\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/pendapatan-negara-tembus-rp2700-triliun-pada-2023-mayoritas-dari-pajak#:~:text=Pendapatan%20negara%20berasal%20dari%20tiga,%2C9%25%20(yoy).)
- Patoni. (2023, April 30). *Mengapa Gus Dur Dulu Ingin Membangun Diplomasi dengan Israel?* NU Online. Retrieved April 1, 2024, from [https://www.nu.or.id/fragmen/mengapa-gus-dur-dulu-ingin-membangun-diplomasi-dengan-israel-YbktS#google\\_vignette](https://www.nu.or.id/fragmen/mengapa-gus-dur-dulu-ingin-membangun-diplomasi-dengan-israel-YbktS#google_vignette)

- Santoso. (2024). *Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza tembus 33.000 orang*. ANTARA News. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/4045821/jumlah-warga-palestina-yang-tewas-di-gaza-tembus-33000-orang>
- The Media Line. (n.d.). *Kuwait Stands Firm: No Israel Ties Without Palestinian Statehood*. <https://themedialine.org/headlines/kuwait-stands-firm-no-israel-ties-without-palestinian-statehood/>
- UNRWA (2023). *UNRWA Welcomes US \$2 Million Contribution from Kuwait*. Retrieved October 08, 2023, from <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unrwa-welcomes-us-2-million-contribution-kuwait>
- Wulan, M. K. (2023). *PMI Segera Kirim Bantuan Senilai Rp 2,9 Miliar ke Gaza*. *Kompas.id*. Retrieved July 23, 2022, from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/29/pmi-segera-kirim-bantuan-senilai-rp-29-miliar-ke-gaza-1>
- Zulyadi, R., & Siregar, F. Y. D. (n.d.). *PERAN STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN PALESTINA*. <https://mh.uma.ac.id/peran-strategi-politik-luar-negeri-indonesia-dalam-mewujudkan-kemerdekaan-palestina/>
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019.
- Aisara, H. A. (2021). *Motivasi Kuwait Memainkan Peran Mediator Dalam Krisis Qatar Periode 2017-2018*. *Skripsi*.
- Chalidah, F. N. (2019). *Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kyrgyzstan Pasca Pembatalan The 1993 Bilateral Agreement Pada Tahun 2015* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Priatmojo, W. (2022, Januari 17). *Faktor Pengaruh Pemikiran Politik Gus Dur Terhadap Ide Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel* [S1 thesis]. Universitas Muhammadiyah.
- Rohani, I. (2023, September 14). *Upaya Diplomasi Publik Indonesia Terkait Kemerdekaan Palestina Pada Periode Pemerintahan Joko Widodo Jilid I Tahun 2014-2019* [Skripsi]. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/212094/>